**BAB IV**

**PERJUANGAN OPU DAENG RISADJU**

**TAHUN 1930-1950 DI SULAWESI SELATAN**

Nasionalisme Indonesia merupakan suatu gejala sejarah yang hanya bisa dipahami bila kita menempatkannya pada proses sejarah. Karena itu, pengaruh pengawasan politik Belanda di luar Jawa utamanya di Sulawesi Selatan permulaan abad ke-20 tepatnya tahun 1905, serta muncul dan berkembangnya organisasi social politik dan keagamaan sebagai wadah untuk mematangkan nasionalisme sekitar tahun 1930, merupakan dua hal yang menjadi fokus perhatian.[[1]](#footnote-1)

Gejolak perlawanan yang terjadi di Sulawesi Selatan menentang pendudukan Hindia Belanda dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek local dan aspek nasional. Aspek lokal dianggap sebagai reaksi atas kebijakan politik *Pax Nerlandica* yang bertujuan menempatkan semua wilayah di bawah dominasi Belanda. Melalui kebijakan politik itu Pemerintah Hindia Belanda bersikap sewenang-wenang dalam mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Kebijakan politik *Pax* *Nerlandica* dan sikap kesewenang-wenangan bila ditinjau dari segi hukum, merupakan tindakan melanggar hukum oleh pihak Pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah terutama Makassar, Bone, Turatea, Bulukumba, Soppeng, Wajo dan Luwu; yang dalam *Regeeringsreg3ement* tahun 1854, daerah-daerah tersebut dimasukkan sebagai wilayah yang merdeka dan berdaulat[[2]](#footnote-2)

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional dapat dijelaskan bahwa sejak lama orang Sulawesi Selatan telah menjalin hubungan “persaudaraan” dengan berbagai macam etnis yang ada di Nusantara utamanya dalam kepentingan perdagangan. Dalam hubungan inilah maka gejolak perlawanan anti kolonialisme yang terjadi di Sulawesi Selatan dapat dianggap sebagai “Signal Nusantara”. Suatu ajakan untuk bangkit bersama-sama menentang penjajahan, terutama ditujukan kepada para pejuang di wilayah Jawa dan Madura yang ketika itu wilayahnya telah lama ditetapkan sebagai wilayah yang diperintah langsung dan bagian dari kekuasaan Hindia Belanda. [[3]](#footnote-3)

Bagi orang Bugis Makassar yang tersebar di kepulauan Nusantara baik sebagai saudagar di lautan dan darat, tetap setia mengikuti tradisi perlawanan Karaeng Bonto Marannu dan Karaeng Galesong yang tidak puas atas isi Perjanjian Bungaya 1667, mereka menganggap orang Belanda adalah “musuh jaman” dan dengan demikian maka di tempat manapun juga di Nusantara dan di waktu kapan saja bila berpapasan dengan orang atau pasukan Belanda, mereka harus diperangi, baik secara berkelompok atau ikut serta dengan pejuang setempat.

Kontribusi PSII sangat besar dalam melakukan perlawanan untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan indonesia tahun 1930-1950 tidak lepas dari perjuangan Opu Daeng Risadju dan perkembangan PSII di wilayah Indonesia.

1. **Perjuangan Opu Daeng Risadju Masa Kolonial Belanda Tahun 1930-1942**

Berdirinya Psii di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari perkembangan PSII di wilayah Indonesia lainnya. Studi tentang kepartaian hampir tak pernah lepas dari perbincangan elite yang ada di dalamnya karena perwajahan dan dinamika partai sedikit banyak dipengaruhi oleh dinamika dan struktur kekuasaan elite yang sangat bervariasi di masing-masing partai. Di sisi lain, dinamika internal partai dalam salah satu periode kepartian Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang dalam hal ini adalah rezim negara. Oleh karena itu, PSII sebagai organisasi kepartaian menjadi salah satu entitas politik yang mampu menjelaskan dinamika internal kepartian sekaligus relasinya dengan negara sebagai lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap turbulensi internal partai. Urgensi PSII sebagai partai tidak hanya dilihat sebagai entitas politik Islam, namun juga karena akar sejarah PSII yang sangat jauh mendahului beberapa partai lain di Indonesia sejak gerakan politik Syarikat Islam bergerak melawan kolonial pada awal abad ke-20.[[4]](#footnote-4)

Syarekat Islam (SI) berkembang dari organisasi bernama Syarekat Dagang Islam (SDI) didirikan oleh Haji Samanhudi sebagai gerakan para pedagang batik di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk menghadapi persaingan dari pedagang Cina. Pada 10 September 1912, atas saran seoarang tokohnya yang bernama H.O.S Cokroaminoto, organisasi tersebut mengubah namanya Syarekat Dagang Islam diubah menjadi Syarekat Islam (SI). Kegiatannya pun berubah dari Organisasi Pedagang Batik menjadi gerakan politik yang beranggotakan kaum muslim dari semua golongan. [[5]](#footnote-5)

Awalnya, untuk mendapat pengakuan dari pemerintah Kolonial, Syarekat Islam menyatakan tidak terlibat dalam politik. Syarekat Islam juga menyatakan kesetiaan pada pemerintah Belanda. Sikap tersebut disambut baik oleh penasehat masalah Islam pemerintah Kolonial, Snouck Hurgronje. Ia menyarankan agar pemerintah Belanda tidak mengambil kebijakan negatif terhadap Syarekat Islam. Sebaliknya, Syarekat Islam harus dibiarkan berkembang dengan damai sebagai gerakan kebangkitan harga diri orang Jawa yang sah. Saran itu diterima oleh Gubernur Jendral Idenburg yang menganut paham politik Etis. Ia memberi pengakuan terhadap Syarekat Islam sebagai organisasi lokal, bukan nasional. Artinya, setiap cabang Syarekat Islam berdiri sendiri dan masing-masing harus mendaftar sendiri-sendiri. [[6]](#footnote-6)

Berdirinya Syarekat Islam di Solo Tahun 1912, Syarekat Islam di Makasar Tahun 1913, Kongres Syarekat Islam pertama di Surabaya Tahun 1913, berdirinya Syarekat Islam cabang Mandar di Panombang Tahun 1914, berdirinya Syarekat Islam cabang Sinjai Tahun 1921, Opu Daeng Risaju menjadi anggota SI cabang Pare-Pare Tahun 1927, berdirinya Syarekat Islam cabang Barru Tahun 1928.

Sementara bagi organisasi sosial yang berazaskan agama, pemerintah bertindak agak lunak namun tetap mendapatkan pengawasan yang ketat. Khusus untuk organisasi modern Islam ingin memberikan masalah Islam, di lain pihak juga ingin membentuk dan mengarahkannya. Kedua sikap ini sebenarnya bergantung pada posisi dari anggotanya, bila mereka kooperatif tentu dibiarkan dan bila menunjukkan gejala militan atau ada potensi ke arah itu maka mendapat tindakan hukum.[[7]](#footnote-7)

Organisasi ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketatanegaraan yang berorientasi politik seperti menentang perlakuan yang sewenang-wenang dan ketidakadilan atas penduduk pribumi. Ide emansipasi yang ditawarkan oleh SI untuk membebaskan diri dari kebodohan keterikatan tradisi yang terbukti telah gagal memperbaiki kehidupan, menarik bagi bangsawan karena dipandang sebagai jalan keluar bagi pembebasan diri dari dominasi kolonial.[[8]](#footnote-8)

Diantara bangsawan yang terkemuka di Sulawesi Selatan yang menjadi anggota SI adalah Andi Ninnong dari Wajo, Andi Abdul Kadir Tenrisesu dari Tanete Barru, dan Opu Daeng Risadju dari Luwu, yang menjadi pelindung dan pendukung SI adalah Andi Jemma Datu Luwu, Andi Makassau dan Abdullah Bau Masepe keduanya adalah Datu Suppa. Sampai pada tahun1915, anggota cabang SI di Sulawesi Selatan mencapai 2.270 orang dan sebagian besar adalah para pedagang.[[9]](#footnote-9)

Awal abad ke-20, merupakan babakan baru dalam konteks sejarah pergerakan di Indonesia menentang imperialisme-kolonialisme, yaitu bangkitnya kesadaran nasional. Sehubungan dengan ini, tanpa mengurangi rakyat perlawanan rakyat sebelum kebangkitan nasional, ia telah menjadi bukti akan hasrat kehadiran kemerdekaan bangsa. Perlawanan rakyat sebelum abad keduapuluh, telah merupakan tonggak sejarah pada fase-fase berikutnya. Disadari, bahwa pola umum perlawanan rakyat tersebut bersifat lokal dan dilakuksn secara sporadis, sehingga satu per satu dapat dipatahkan oleh pemerintah kolonial yang memiliki sistem organisasi dan peralatan militer yang lebih mantap serta ditunjang oleh politik kolonialnya yang terkenal *Divide et impere*.[[10]](#footnote-10)

Atas dasar pengalaman-pengalaman di masa lampau itu, mulailah satu fase baru dalam perjuangan bangsa yaitu “Kebangkitan nasional” yang ditandai dengan berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 mei 1908 di Batavia (Jakarta) yang merupakan embrio yang bersifat organisasi-organisasi yang bercorak kebangsaan.[[11]](#footnote-11)

Dalam fase ini telah timbul kesadaran yang mendalam akan arti persatuan, bahwa dengan menghimpun secara terorganisir segenap potensi perjuangan yang ada, akan merupakan kekuatan tangguh dalam usaha mewujudkan kemerdekaan. Puncak kesadaran bangsa akan makna persatuan, terikrar pada tanggal 28 Oktober 1928 yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda, yang isinya tiga sendi persatuan Indonesia, yaitu persatuan tanah air, bangsa dan bahasa.

Strategi dan taktik perjuangan mengalami perubahan, yaitu peleburan potensi-potensi perjuangan ke dalam wadah organisasi pergerakan kebangsaan. Setelah Budi Utomo, lahirlah berbagai organisasi sosial politik antara lain: Syarikat Islam Indonesia, Indische partij (IP) Gerakan-gerakan Pemuda, Perhimpunan Permufakatan Indonesia (PPPKI) tahun 1926 yang disusul dengan dibentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI), dan lain-lain.[[12]](#footnote-12)

Di Sulawesi Selatan dalam periode ini, sesudah tahun 1920 baru timbul usaha-usaha kaum pergerakan. Hampir semua gerakan dimulai di Makassar; ini dapat dimengerti karena Makassar merupakan pintu bagi daerah Sulawesi Selatan dan juga tempat berkumpulnya kaum menengah dan masyarakat cendikiauan di daerah ini. Kehadiran berbnagai organisasi sosial politik di daerah ini, Organisasi yang bersifat Radikal salah satunya ialah:

Syarikat Islam (SI) merupakan pelopor gerakan nasional Indonesia yang paling awal. Sebagai gerakan masif yang menentang kolonialisme, SI menghimpun kekuatan sosial yang bersifat transprimordial, multietnik, dan ideologis. Kepeloporan SI dalam gerakan nasional dan kontribusinya yang signifikan bagi Indonesia telah banyak diteliti banyak sejarawan dan ilmuan politik.[[13]](#footnote-13)

Dalam perkembangannya, SI kemudian bermetamorfosis menjadi gerakan politik dan memanifestasikan dirinya menjadi partai politik. SI berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Di awal pembentukannya sebagai partai politik, PSII merupakan partai yang relatif besar, disegani, dan banyak memiliki tokoh negarawan piawai. Haji Agus Salim, Abdul Muis, Arudji Kartawinata, Mohammad Roem, Abu Hanifah, Anwar Tjokroaminoto, dan Harsono Tjokroaminoto merupakan contoh tokoh PSII yang dikenal sebagai negarawan terkemuka PSII. Dari satu periode sejarah ke periode sejarah berikutnya, PSII selalu menunjukkan eksistensi dirinya dan berjuang memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.[[14]](#footnote-14)

Serikat Islam Indonesia (SII) cabang Syarikat Islam Indonesia di Makassar didirikan oleh Ince Abdul Rahim, Ince Tajuddin dan Baharuddin. Adapun tokoh yang membawa organisasi ini ke Sulawesi Selatan ialah Haji Yahya, seorang pergerakan asal Tanete Barru yang pernah tinggal beberapa tahun di Jawa dan bersahabat baik dengan HOS Cokroaminoto pada tahun 1930 Syarikat Islam Indonesia di Sulawesi Selatan Memperoleh tiga orang anggota dari golongan adat yang potensil yakni Andi Abdul Qadir anggota adat Suaparaja Tanete, Andi Ninong dari Suapraja Wajo dan Seorang perempuan bernama Opu Daeng Risaju Sparaja Luwu.[[15]](#footnote-15)

Perkembangan PSII di Sulawesi Selatan di tandai dengan Berdirinya Syarekat Islam cabang Pambusuang Tahun 1929, kelompok Pappadang (kelompok pedagang Mandar) mendirikan Syarekat Mandar di Padang Sumatera Barat Tahun 1929, perubahan nama dari Syarekat Islam ke Partai Syarekat Islam Indeonesia (PSII) Tahun 1929, PSII menerima 3 anggota baru dari golongan adat yang potensial yakni: Andi Abdul Kadir anggota Swapraja Wajo dan Opu Daeng Risadju anggota Swapraja Luwu Tahun 1930. [[16]](#footnote-16)

Masa pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan tidak hanya diwarnai dengan bermunculannya gerakan rakyat yang menentang pemerintahan dan kekuasaan Belanda, tetapi juga ditandai dengan munculnya organisasi sosial dan politik yang bercorak modern. Nasionalisme atau agama yang dijadikan sebagai suatu azas dan tujuan dari beberapa organisasi sosial dan politik tersebut. Pemerintah Hindia Belanda bertindak sangat keras kepada organisasi sosial yang berazaskan nasionalisme karena dianggap melawan pemerintah dan mengganggu ketertiban umum.

Sampai dengan masuknya Jepang ke Sulawesi Selatan, Syarikat Islam Indonesia telah memiliki anak-anak cabang di Makassar, Tanete, Barru, Pare-Pare, Majene, Rappang, Sidenreng, Paloppo, Sengkang, Bulukumba dan Banteng. Sehubungan dengan sepak terjang Syarikat Islam Indonesia di Sulawesi Selatan, tidak dapat dilupakan seorang srikandi organisasi tersebut yang pantang menyerah dan mengadakan kompromi dengan penjajah yaitu Opu Daeng Risaju.

Opu Daeng Risadju berkenalan dengan PSII terjadi pada tahun 1929 dan Opu daeng Risadju berinteraksi dengan Haji Yahya dan Haji Agus Salim yang merupakan tokoh Syarikat Islam cabang pare-pare, Sulawesi Selatan. Dari hasil komunikasi yang terjalin maka dihasilkan Kesamaan cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan dan melepaskan dari cengkraman penjajah Belanda hingga akhirnya Opu Daeng Risaju semakin bersemangat untuk berjuang terutama untuk memperlebar cabang PSII di Sulawesi Selatan terkhusus di daerah Palopo.

Pada masa pergerakan nasional, Opu Daeng Risadju aktif berorganisasi di PSII bersama suaminya dan tinggal di Pare-Pare. Ketika kepulangannya ke Palopo, Opu Daeng Risadju mendirikan PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui rapat akbar bertempat di Pasar Lama Palopo. Rapat ini dihadiri oleh wakil aparat pemerintah kerajaan Luwu, pengurus PSII pusat, pemuka masyarakat Luwu dan masyarakat umum. Pengurus pusat PSII yang hadir adalah Kartosuwiryo.[[17]](#footnote-17) Dalam rapat tersebut Opu Daeng Risadju terpilih sebagai ketua, sedangkan Mudehang terpilih sebagai sekertaris seorang perempuan yang masih bersaudara dengan Opu Daeng Risadju, terpilihnya Mudaheng karena merupakan suatu kebutuhan organisasi karena Mudaheng seorang perempuan tamatan sekolah dasar lims tahun.

Pendiri cabang PSII cabang Luwu, Wajo, dan Tanete/Barru 1930, Opu Daeng Risadju mendirikan kongres PSII di Pare-Pare. Bertemu dengan pengurus pusat PSII H. Agus Salim dan A.M. Sangaji. Tahun 1930, di bawah kepemimpinan PSII cabang Palopo berkembang pesat, kemudian lahir cabang-cabang PSII di beberapa distrik seperti di Malangke sebagai bagian dari cabang PSII Luwu Tahun 1930, mendengar adanya aktifitas politik yang dilakukan oleh Opu Daeng Risadju, Controleur tersebut mendatangi Opu Daeng Risadju dan meminta daftar jumlah anggota PSII di Malangke yang berjumlah 70 orang, namun Opu Daeng Rsadju menolaknya, aktivitas radikal di PSII membuat Belanda menangkapnya beserta 70 anggota partai dan di bawa ke Masamba, karena di anggap tidak bersalah anggota partai lainnya dibebaskan keesokan harinya, namun Opu Daeng Risadju tetap di tahan dan menjatuhkan vonis 13 bulan penjara.[[18]](#footnote-18)

penangkapan Opu Daeng Risadju menyulut solidaritas rakyat bahkan membuat PSII semakin berkembang Tahun 1930, mendirikan ranting PSII di Malili Tahun 1932, berangkat ke Jawa bertrmu dengan tokoh-tokoh nasional untuk mengikuti Kongres Majelis Taklim PSII di Batavia (Jakarta) Tahun 1933 yang oleh pemerintahan Hindia Belanda dianggap sebagai orang-orang yang dicurigai, anggota dewan yang pro-Belanda menuntut agar Opu Daeng Risaju dijatuhi hukuman buang atau diselong selama tujuh tahun lamanya. Akan tetapi Opu Balirante yang pernah menolong Opu Daeng Risadju, menolak usul tersebut, akhirnya diperoleh kesepakatan Opu Daeng Risadju mendapat hukuman penjara 14 bulan pada tahun 1934. Sebagai orang hukuman, Opu Daeng Risadju harus bekerja di luar penjara seperti orang-orang lainnya karena tidak mempunyai lagi hak-hak istimewa sebagai berlaku bagi bangsawan.

Perkebangan PSII ini tentu saja yang membuat gelisah para pejabat Belanda dan pembesar-pembesar kerajaan, termasuk raja Luwu sendiri. Mereka khawatir karena PSII ketika itu telah mengambil kebijaksanan yang bersifat noncooperatif dengan pemerintah, dan apa yang mereka khawatirkan itu memang terbukti dikemudian hari. Opu Daeng Risaju bersama dengan teman-temannya menempuh pula kebijaksanaan noncooperatif dengan penguasa Belanda dan bahkan dengan penguasa kerajaan. Sikap noncooperatifnya inilah yang pada akhirnya menjebloskannya ke dalam penjara Belanda.

Atas tindakan refresif ini pemuka-pemuka masyarakat di kacamatan “Malangke”, pengurus dan anggota PSII Ranting Malangke mengundang Opu Daeng Risaju untuk berbicara dalam suatu rapat umum.[[19]](#footnote-19) Pembicaraan Opu Daeng Risaju dalam kesempatan itu dinilai oleh kepala Distrik Malangke sebagai suatu pidato propokatif yang menghasut rakyat untuk tidak taat kepada pemerintah. Kepala distrik Malangke segera melaporkan hal itu kepada kontroleur di Masamba. Atas laporan tersebut dikerahkanlah polisi untuk menangkapnya dan membawanya ke Palopo untuk diperhadapkan ke pengadilan. Tetapi, sebelum diadili atas dasar pertimbangan kemanusian karena dia perempuan dan seorang bangsawan tinggi Asisiten Resident Luwu meminta dulu kepada Datu Luwu Andi Kambo, agar membujuknya supaya meninggalkan partainya dan menghentikan kegiatan politiknya. Kalau bersedia maka dia akan dibebaskan dari segala tuntutan. Namun ia menolaknya, “Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya.”[[20]](#footnote-20)

Itulah penggalan kalimat yang diucapkan Opu Daeng Risadju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu, ketika Datu Luwu Andi Kambo membujuknya dengan berkata “Sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah “kedatuan,” sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina. Karena itu, kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu. Namun Opu Daeng Risaju,rela menanggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan kedalam penjara selama 13 bulan. Dengan peristiwa ini beliau tercatat sebagai perempuan pertama yang dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda karena politik.

Karena kegiatan-kegiatannya di anggap semakin membahayakan pemerintah kolonial, pada tahun 1934 beliau kembali dihukum penjara dan kerja paksa selama 14 bulan. Setelah lepas dari penjara dan selama pendudukan Jepang, beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa melewatkan kesempatan-kesempatan untuk menanamkan patriotisme bangsa.[[21]](#footnote-21)

Setelah selesai menjalankan masa hukumannya. Beliau ke beberapa daerah di Malili mengadakan propaganda dan berusaha mendirikan ranting Sarekat Islam Indonesia pada tempat-tempat yang memungkinkan. Bersama dengan suaminya, menyusuri pantai timur teluk Bone, menyinggahi beberapa desa untuk mengadakan rapat-rapat umum. Di distrik Patampanua, Opu Daeng Risadju ditangkap bersama suaminya, kemudian keduanya dirantai dibawa ke Palopo.[[22]](#footnote-22)

Ketika Opu Daeng Risadju keluar dari penjara keduakalinya pada tahun 1935, di kerajaan Luwu sedang timbul krisis politik. Wafatnya Datu Luwu Andi Kambo Daeng Risompa menimbulkan perpecahan di kalangan istana mengenai siapa yang harus menjadi penggati Datu. Perpecahan ini timbul karena adanya campurtangan pemerintah Kolonial Belanda dalam hal pergantian Datu. Menurut adat kerajaan Luwu, yang berhak menjadi Datu adalah anak pertama dari Datu tersebut , yaitu Andi Jemma. Akan tetapi Belanda tidak menyukai Andi Jemma karena dinilai memiliki kedekatan dengan tokok-tokoh pergerakan nasional saat itu seperti tokoh PSII yaitu lebih pro pada perjuangan Opu Daeng Risadju Tahun 1935, Sulawesi Selatan.

Melihat karakter Andi Jemma yang dinilai memiliki sikap nasionalis ini Belanda selalu berusaha agar Andi Jemma tidak terpilih menjadi Datu, Sndi Jemma dituduh Belanda mengambil kas kerajaan untuk kepentingan pribadi. Memansnya suhu politik ini, dimanfaatkan oleh Opu Daeng Risadju untuk mempengaruhi rakyat, dengan tujuan untuk mengimbangi campur tangan belanda dalam pemilihan Datu. Opu Daeng Risadju dan Andi Jemma adalah sahabat, meraka sama-sama berjuang merintis pendirian sekolah agama di Palopo. Opu Daeng Risadju meminta kepada rakyat agar mau memilih Andi Jemma. Himbauan Opu Daeng Risadju mendapat sambutan antusias dari rakyat. Mereka mendesak para anggota Dewan Adat untuk memilih Andi Jemma sebagai Datu Luwu yang baru. Dalam pemilihan Datu, aspirasi rakyat memiliki pengaruh yang sangat besar. Melalui dorongan sebuah Dewan Adat yang bertugas memilih Datu, suara rakyat dapat disalurkan. Bagi anggota Dewan Adat, sudah menjadi kewajiban untuk memperhatikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Dengan mekanisme inilah akhirnnya Andi Jemma terpilih menjadi Datu Luwu. Terpilihnya Andi Jemma maka membuat PSII di Luwu semakin berkembang dibawah pimpinan Opu Daeng Risadju sampai dengan berakhirnya Penjajahan Belanda dan awal kedatangan Jepang tahun 1942.

1. **Perjuangan Opu Daeng Risadju Terhadap Kolonial Jepang Tahun 1942-1945**

Pada taanggal 9 februari 1942 di tandai dengan bangsa Jepang melakukan pendaratan di Makassar dan daerah-daerah sekitarnya, termasuk Tana Luwu setelah panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal H Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada pasukan Militer Jepang dibawah pimpinan Letnan Jenderal Hitosi Imamura pada 8 Maret 1942. Jatuhnya kekuasaan Belanda ini menandai berakhirnya kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda, dan saat itu Indinesia secara resmi memasuki periode baru yaitu masa Pendudukan Jepang. [[23]](#footnote-23).Dengan adanya pendudukan Jepang di Tana Luwu membuat semangat Opu Daeng Risadju semakin berkobar untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan di daerahnya. Namun, setelah Jepang menyerah kepada tentara Sekutu, datanglah Nica yang tidak lain adalah Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.[[24]](#footnote-24)

Dalam sejarah perjuangan melawan Belanda di Sulawesi Selatan, baik ketika melawan VOC, maupun pemerintah kolonial Belanda, raja atau kelompok bangsawan di Sulawesi Selatan, tidak pernah berhenti berjuang melawan penjajah. Demikian pula rakyat senantiasa mendukung dan membantu secara langsung dalam perjuangan yang dilakukan oleh raja-raja atau kelompok bangsawan.

Pendudukan jepang di Sulawesi Selatan ditandai dengan mendaratnya pasukan Jepang di Makassar tanggal 9 Februari 1945, namun secara resmi dikuasai oleh Jepang, setelah panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jendral H Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada pasukan militer Jeapang di bawah pimpinan Letnan Jendral Hitosi Imamura pada 8 maret 1942. Jatuhnya kekuasaan Kolonial Belanda ini menandai berakhirnya kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda, dan saat itu Indonesia memasuki periode baru, yaitu masa pendudukan Jepang, pada masa pendudukan Jepang Sulawesi Selatan berada di bawah Aangkatan laut Jepang (Armada Selatan kedua) yang daerahnya meliputi Sulawesi, Kalimantan , dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.[[25]](#footnote-25)

Kedatangan Jepang pada mulanya disambut hangat masyarakat Sulawesi Selatan, karena rakyat mempercayai propoganda yang di dengungkan oleh Jepang, bahwa bangsa Jepang sebagai pemimpin, pelindung dan pembebas Asia dari penjajahan Barat. Sikap jepang pada mulanya bersahabat dengan memberikan kebebasan pada rakyat untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun itu semua hanyalah taktik untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Perkembangan selanjutnya jepang bertindak keras dengan melarang smua organisasi politik. Jika pada masa Penjajahan Belanda organisasi-organisasi kebangsaan masih di ijinkan beraktifitas, pada masa Pendudukan Jepang semua organisasi kebangsaan yang ada pada masa Jepang semua organisasi kebangsaan yang ada dibubarkan. Jepang hanya mengijinkan organisasi yang dibentuknya seperti Gerakan 3 A dan poetra (Poesat Tenaga Rakyat).

Dalam babakan terakhir perjuangan mencapai kemerdekaan tersebut, raja-raja di Sulawesi Selatan telah berperan sebagai pelopor nasionalisme. Disamping itu, juga melibatkan diri secara langsung dalam aksi-aksi perjuangan fisik bersama-sama rakyat yang dipimpinnya. Kelompok bangsawan atau raja-raja dalam peranannya sebagai pelopor nasionalisme, tidak saja memberikan berbagai kemudahan, sumbangan dana untuk kepentingan perjuangan, perlindungan politik, tetapi juga langsung menjadi pemimpin dalam operasi militer dalam melawan Belanda. Faktor inilah yang menyebabkan hati rakyat dalam periode perjuangan selalu dekat dengan pemimpinnya. Demikian pula hati pemimpin yang telah manunggal dengan hati rakyat dalam periode perjuangan yang sangat menentukan tersebut.

Opu Daeng Risadju sebagai ketua PSII cabang Palopo, pada saat itu tidak mempunyai pilihan lain, dan terpaksa mengikuti kebijakan pemerintah Militer Jepang. Aktifitas Opu Daeng Risadju terbatas hanya melakukan kunjungan-kunjungan ke para anggota partai dan keluarganya. Secara organisatoris, pada masa pendudukan Jepang, jabatan ketua PSII cabang Palopo diserahkan oleh Opu Daeng Risadju kepada keponakannya Muhammad yamin. Opu Daeng Risadju hanya berkedudukan sebagai penasihat, namun Opu Daeng Risadju tetp aktif dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke desa-desa dengan melakukan kegiatan sisial dan keagamaan secara diam-diam dan secara kekeluargaan. Hal ini di mungkinkan karena kepribadian Opu Daeng Risadju dikenal sangat baik oleh masyarakat desa bahkan kesederhanaan, ketabahan, kesabaran dan pengetahuan menjadi suri tauladan bagi masyarakat desaa.[[26]](#footnote-26)

1. **Perjuangan Opu Daeng Risadju Masa Orde Lama 1946-1950**

Pendudukan Jepang di Indonesia berakhir dengan menyerah Jepang kepada sekutu tanpa syarat. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berita proklamasu kemerdekaan di Jakarta sampai ke Sulawesi Selatan melalui radio dan surat khabar Pewarta Selebes yang dipimpin oleh Andi Burhaanuddin, berita kemerdekaan disambut gembira oleh rakyat dan sebagian besar oleh kalangan bangsawan. Dukungan mereka nampak dari gigihnya mereka menolak datangnya kembali tentara Belanda ke wilayah mereka.

Penentangan rakyat Sulawesi Selatan terhadap kembalinya Belanda ke wilayah mereka memicu pemberontakan para pemuda. Dengan datangny NICA sesudah proklamasi kemerdekaan, membuat kembali semangat Opu Daeng Risaju, Pada usianya yanng 66 tahun, Opu Daeng Risadju masih melanjutkan perjuangannya melawan Belanda di Bajo, Sulwesi Selatan, dan mereka memicu terjadinya pemberontakan para pemuda pada 23 Jaunari 1946, terjadi peristiwa perlawanan besar terjadap pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai daerah Luwu. Dan peristiwa ini berimbas pada daerah-daerah sekitarnya. Sikap NICA yang ingin menguasai daerah Luwu serta datang dengan membonceng pasukan sekutu pasukan Australia. Dan tugas utama sekutu ini adalah dengan melucuti tawanan-tawanan perang Jepang. Namun dalam kenyataan tentara sekutu Australia banyak banyak membantu NICA dengan tindakan-tindakan yang sering memicu konflik dengan pendudukan. Tindakan-tindakan tersebut dengan menurunkan bendera Merah Putih yang sedang berkibar, memaksa rakyat untuk menyerahkan uang dan melucuti senjata yang dimiliki para pemuda.[[27]](#footnote-27)Perjuangan tersebut memberikan inspirasi kepada para pemuda untuk tetap mengobarkan semangat juang membela tanah air tercinta.[[28]](#footnote-28)

Bahkan sampai di zaman revolusi 1945, raja-raja atau kelompok bangsawan serta rakyat Sulawesi Selatan terus menerus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Antara raja atau kaum bangsawan dengan rakyat ada kaitan historis yang sangat kokoh dalam melawan Belanda, menyebabkan kedua kelompok tersebut selalu bekerjasama untuk mengusir penjajah. Inilah yang menyebabkan semangat perlawanan dalam perjuangan melawan Belanda tidak pernah padam dalam suatu periode tertentu. Mereka tidak pernah patuh atau taat dan tunduk diperintah oleh Belanda tanpa melakukan reaksi terhadap yang menjajahnya.

Dendam masyarakat Sulawesi Selatan terhadap penjajah tidak pernah padam sampai perang kemerdekaan atau dalam revolusi. Dendam tersebut, tidak terlepas dari budaya *siri*, budaya yang menekankan harga diri dan martabat. Meskipun mengalami kekelahan demi kekalahan dari Belanda, karena faktor persenjataan yang dimiliki Belanda lebih moderen, tetapi semangat juang tidak pernah padam sehingga diakhir pertarungan, bangsa kita keluar sebagai pemenang. Salah satu tindakan NICA yang membuat marah para pemuda di Luwu dan menjadi pemicu pemberontakan 23 Januari 1946, adalah ketika tentara NICA menggeledah rumah Opu Gawe (paman Andi Jemma) unttuk mencari senjata, namun ketika tidak menemukan senjata yang dicarinya, tentara NICA kemudian menuju ke Masjid dan mereka menanyakan orang-orang yang berada dalam masjid yang bernama Tomanjanawi. Tidak puas dengan jawabannya, tentara NICA mengobrak abrik masjid dan menginjak-injak Alquran, bahkan Tomanjanawi sendiri dipukuli karena mencegah tentara NICA di masjid.

Peristiwa 23 Januari 1946 di Palopo kemudian merembek ke kota-kota lainnya. Di kota lain muncul konflik-konflik senjata anatara tentara NICA dengan para pemuda, salah satu kotanya yaitu Belopa, kota tempat Opu Daeng Risadju tinggal. Opu Daeng Risadju ketika di Belopa memiliki peran yang sangat besar terhadap upaya perlawanan terhadap tentara NICA, sejak masa penjajahan Belanda, memiliki hubungan yang dekat dengan para pemuda. Untuk memobilisasi kekuatan pemuda. Aktifitas Opu Daeng Risadju menanamkan semangat perjuangan bagi para pemuda tetap dilanjutkan pada masa revolusi kemerdekaan. Opu Daeng Risadju banyak melakukan mobilisasi terhadap para pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda.[[29]](#footnote-29)

Opu Daeng Risadju Karena keberaniannya dengan melawan Nica Opu menjadi inacaran nomor satu selama Nica berada di Sulawesi Selatan. [[30]](#footnote-30) upaya penangkapan yang dilakukan NICA adalah dengan cara mengeluarkan pengumuman yang lebih mirip syaimbara. NICA mengumumkan bahwa “Barang siapa yang dapat menemukan Opu Daeng Risadju baik dalam keadaan hidup atau mati, akan di beri hadiah”. Akan tetapi tidak seorang rakyat yang mau memberitahukan keberadaan Opu Daeng Risadju.

Selama pencarian Opu Daeng Risadju bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, dari Belopa menuju Suli,, namun beliau terlebih dahulu singgah di Cimpau, sambil menunggu situadsi yang tepat memasuki daerah Suli, karena di daerah itupun telah tersebar kaki tangan NICA. Namun usaha Opu Daeng Risadju menghindari NICA tidak berhasil. [[31]](#footnote-31)Mata-mata NICA berhasil mengetahui keberadaannya di daerah Latonro. Dalam suatu penyerangan Opu Daeng Risadju ditangkap dan dipaksa berjalan kaki sampai 40 Km menuju Watampone.

Di kota itu ia dipenjara selama satu bulan lalu dibawa kesengkang dan di pulangkan ke Bajo. Belum puas menekan Opu Daeng Risaju dengan cara tersebut, NICA juga menyiksa perempuan yang kala itu sudah cukup renta di distrik Bajo. Kepala distrik Bajo, Ladu Kalapita membawa Opu Daeng Risaju ke tengah lapangan dan memaksanya berdiri di sana menghadap pada matahari. Kalapita juga menembakkan peluru ke pundak Opu Daeng Risaju dan membuatnya jatuh tersungkur. Usai itu, mereka membawanya ke penjara di bawah tanah Opu Daeng Risadju menjalani tahanan selama 11 bulan tanpa diadili sebelum menetap di Belopa. Dalam tahanan itu Opu Daeng mengalami berbagai penyiksaan sampai kehilangan pendengarannya seumur hidup.

Setelah pengakuan kedaulatan dan usianya semakin lanjut pada tahun 1949 ia pindah ke pare-pare bersama puteranya H. Abdul Kadir Daud. Sejak tahun 1950 Opu Daeng Risaju tidak aktif lagi di PSII, ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi tersebut. Ketika puteranya meninggal, Opu Daeng kembali ke Palopo dan meninggal pada tanggal 10 Februari 1964, dan jasadnya dimakamkan di Lokke, makam para raja Luwu.[[32]](#footnote-32)

1. Muhammad Asykin, Jurnal “*Sejarah dan Budaya*” Volum 4 Nomor 2, *Geneologi Gerakan Nasionalisme di Sulawesi Selatan 1905-1942*. (Bulukumba, 2015), P. 172 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Asykin, Jurnal “*Sejarah dan Budaya.*  P 172 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Asykin, Jurnal “Sejarah dan Budaya” Volum 4 Nomor 2, *Geneologi Gerakan Nasionalisme di Sulawesi Selatan 1905-1942.*  P 172 [↑](#footnote-ref-3)
4. Valina Singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi politik hingga konflik kekuasaan elite,* ( Jakarta: Yayasan Putaka Obor Indonesia, 2014), P. 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. 2q M.C. Ricklefs, *A History Of Modern Indonesia, hampshire, inggris: MacmillanEducation Ltd, 1981 (a.b) Hardjowijono Dharmono, Sejarah Indonesia Modern*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 1998.), P. 359 [↑](#footnote-ref-5)
6. 0 Muhammad Iskandar dan Anhar Gonggong, *Muatan Lokal Ensiklopedia Sejarah dan Budaya : Dibawah Kolonialisme Barat*. (Jakarta: Lentera Abadi), P. 166. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Asykin*, Jurnal Sejarah dan Budaya*,,. P. 176 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Asykin*, Jurnal Sejarah dan Budaya*,,. P. 176 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Asykin*, Jurnal Sejarah dan Budaya*,,. P. 176 [↑](#footnote-ref-9)
10. Politik pecah belah atau politik adu domba ( devide et impera) adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang mudah ditaklukan. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Abduh, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985). P 174 [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Abduh, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialism,..*. P. 175 [↑](#footnote-ref-12)
13. Valina Singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi politik hingga konflik kekuasaan elite,..* P. 2 [↑](#footnote-ref-13)
14. Valina Singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi politik hingga konflik kekuasaan elite,..* P. 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Abduh, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialism*,.. p 175-176 [↑](#footnote-ref-15)
16. Opu Daeng Risaju. html http://budayabugis.blogspot.com 2009/12. diunduh pada tanggal 27-03-2018, pukul 08:51 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdurrahman, Linda Sunarti, Dkk*, Opu Daeng Risaju Pahlawan Nasional Wanta Sulawesi Selatan*,. P 7 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdurrahman, Linda Sunarti, Dkk*, Opu Daeng Risaju Pahlawan Nasional Wanta Sulawesi Selatan*, p12 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Abduh, *Sejarah Perlawanan*,.. p 176 [↑](#footnote-ref-19)
20. Opu Daeng Risaju. html http://budayabugis.blogspot.com 2009/12. diunduh pada tanggal 27-03-2018, pukul 08:51 WIB. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Abduh, *Sejarah Perlawanan,..* p 176 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Abduh, *Sejarah Perlawanan*,.. p 176 [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdurrahman, Linda Sunarti, *Opu Daeng Risadju Pahlawan Nasional Wanita Sulawesi Selatan,.* P. 20 [↑](#footnote-ref-23)
24. Dina Alfiyanti, *Mengenal Pahlawan Nasional*, p. 109. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdurrahman, Linda Sunarti, Dkk*, Opu Daeng Risaju Pahlawan Nasional Wanta Sulawesi Selatan,.* P 20 [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdurrahman, Linda Sunarti, Dkk*, Opu Daeng Risaju Pahlawan Nasional Wanta Sulawesi Selatan,.* P 21-22 [↑](#footnote-ref-26)
27. Abdurrahman, Linda Sunarti, Dkk*, Opu Daeng Risaju,..*p. 22-23 [↑](#footnote-ref-27)
28. Tim Grasindo, *Ensiklopedia Pahlawan Indonesia*,. P. 260 [↑](#footnote-ref-28)
29. Abdurrahman, Linda Sunarti, Dkk*, Opu Daeng Risaju,..*p. 25 [↑](#footnote-ref-29)
30. Dina Alfiyanti, *Mengenal Pahlawan Nasional*, p. 109. [↑](#footnote-ref-30)
31. Abdurrahman, Linda Sunarti, Dkk*, Opu Daeng Risaju,..*p. 26 [↑](#footnote-ref-31)
32. J.B Soedarmanta, *Jejak-Jejak Pahlawan: Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), p. 416. [↑](#footnote-ref-32)